



Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Meningkatkan Investasi Berkelanjutan

Zainab Diva Amanda¹, Ghalib Rizki Luthfianto², Kevin Kurnia Yuli Ardikha³, Qusay Alya Difatta⁴, Alsyad Dedin Ryan Syahputra⁵, Sabrina Diyang Awandi Putri⁶, Diana Setiawati⁷

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: C100220223@student.ums.ac.id¹, C100220271@student.ums.ac.id², C100220283@student.ums.ac.id³, C100220291@student.ums.ac.id⁴, C100220295@student.ums.ac.id⁵, C100220377@student.ums.ac.id⁶, ds170@ums.ac.id⁷

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 19 Juli 2025

ABSTRACT

Sustainable investment is a key issue in promoting inclusive and environmentally friendly economic growth amid global challenges. This study aims to analyze the role of the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) in enhancing sustainable investment in Indonesia and to identify the obstacles and strategies employed in this process. The research adopts a normative legal approach with a qualitative method based on literature review, focusing on secondary data from regulations, academic literature, and relevant publications. The results indicate that BKPM plays a strategic role in shaping a conducive investment climate through cross-sectoral coordination, implementation of the OSS system, development of sustainable investment guidelines, and promotion of green investment aligned with sustainability principles. The implication of these findings highlights the urgency of institutional strengthening and regulatory harmonization as essential prerequisites for positioning Indonesia as a globally competitive investment destination.

Keywords: BKPM, sustainable investment, regulatory simplification, investment climate

ABSTRAK

Investasi berkelanjutan menjadi isu penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan di tengah tantangan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam meningkatkan investasi berkelanjutan di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka yang berfokus pada data sekunder dari regulasi, literatur akademik, dan publikasi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPM memiliki peran strategis dalam membentuk iklim investasi yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, penerapan sistem OSS, penyusunan panduan investasi lestari, serta promosi investasi hijau yang responsif terhadap prinsip keberlanjutan. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi sebagai prasyarat utama untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi berdaya saing di tingkat global.

Kata Kunci: BKPM, investasi berkelanjutan, penyederhanaan regulasi, iklim investasi

PENDAHULUAN

Investasi merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Peran investasi tidak hanya terbatas pada peningkatan modal dan produktivitas nasional, tetapi juga menyentuh aspek sosial melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks global, negara-negara berlomba menciptakan iklim investasi yang kompetitif guna menarik minat investor asing dan domestik. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, memerlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional (Wiranata, 2006).

Salah satu upaya strategis dalam mendorong investasi adalah melalui regulasi yang kondusif dan birokrasi yang efisien. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk investasi, harus berpijak pada dasar hukum yang sah. Oleh sebab itu, hadirnya Undang-Undang Penanaman Modal dan kebijakan pendukung lainnya menjadi fondasi dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor. Regulasi yang adaptif terhadap dinamika global sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi investasi internasional (Ilmar, 2004; Zaidun, 2018).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berperan sebagai lembaga negara yang menjadi penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bidang investasi. Sejak berdiri pada tahun 1973 dan memperoleh status setingkat kementerian pada tahun 2009, BKPM berfungsi merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelayanan, serta memfasilitasi proses penanaman modal. Melalui pendekatan pelayanan satu pintu, lembaga ini diharapkan mampu menyederhanakan perizinan dan meningkatkan efisiensi administrasi dalam proses investasi (Rusdi, Edwin, & Pramono, 2009).

BKPM juga menjalankan fungsi advokasi bagi para investor, khususnya dalam menekan biaya ekonomi yang tinggi dan menyelesaikan konflik regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan reformasi kebijakan dan implementasi sistem Online Single Submission (OSS), BKPM berusaha membangun sistem investasi nasional yang lebih terintegrasi, transparan, dan ramah terhadap investor. Langkah ini sekaligus menempatkan BKPM sebagai aktor penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan (Roem, 2013).

Investasi berkelanjutan menjadi semakin relevan di tengah tantangan global seperti krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan tekanan terhadap sumber daya alam. BKPM dituntut tidak hanya menarik investasi dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut memperhatikan prinsip keberlanjutan sosial dan lingkungan. Program seperti panduan investasi lestari, promosi investasi hijau, serta kerja sama regional melalui forum ASEAN menjadi bukti komitmen BKPM dalam mengarahkan investasi menuju tujuan pembangunan berkelanjutan (Kementerian Investasi, 2022; Mutiara et al., 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam

meningkatkan investasi berkelanjutan di Indonesia, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi strategi yang diterapkan BKPM untuk mengatasi hambatan tersebut demi terciptanya iklim investasi yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menganalisis peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam meningkatkan investasi berkelanjutan di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan jurnal relevan. Analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi penanaman modal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan serta mengkaji hambatan-hambatan hukum yang dihadapi BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Mendorong Pertumbuhan Investasi Berkelanjutan di Indonesia

Lembaga non-departemen yang menangani penanaman modal sebagai bagian dari pembaharuan ketentuan penanaman modal disebutkan dalam Pasal 27 UUPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (disingkat BKPM) yang disebutkan:

- a. Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi pemerintah, antarinstansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi pemerintah dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada presiden;
- c. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Posisi BKPM yang diatur dalam UUPM semakin menegaskan dan memperkuat peran lembaga non-departemen ini dalam pengelolaan penanaman modal (Harjono, 2007). Dalam Pasal 27, dinyatakan bahwa Kepala BKPM bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penjelasan Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa tanggung jawab langsung kepada Presiden berarti BKPM harus melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan laporan kepada Presiden secara langsung. Setelah pelaksanaan Undang-Undang

Pemerintahan Daerah, sebagian wewenang pengelolaan investasi dialihkan kepada pemerintah daerah. Dengan diterbitkannya UUPM secara formal, BKPM diberikan otoritas untuk mengkoordinasikan berbagai aspek pengelolaan investasi. Ini menjadi penting karena jika semangat untuk mengelola investasi diterapkan secara optimal, maka prosedur pelayanan investasi dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu atap.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan investasi berkelanjutan di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BKPM berfungsi sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemerintah, serta bertugas untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan statusnya yang kini setingkat kementerian, BKPM tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah investasi, tetapi juga pada kualitas investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. BKPM menjalankan beberapa fungsi kunci dalam mendukung investasi, yaitu BKPM bertugas untuk mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal nasional, termasuk pengusulan perencanaan dan penetapan norma serta prosedur pelayanan investasi (Christhina 2015). Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek investasi berjalan secara terpadu dan efisien.

BKPM juga menyediakan layanan perizinan dan dukungan teknis bagi investor, baik domestik maupun asing. Dengan pendekatan *one-stop service*, BKPM berupaya menyederhanakan proses perizinan untuk menarik lebih banyak investasi. Selain itu, BKPM aktif dalam mempromosikan potensi investasi di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun internasional. Melalui berbagai inisiatif promosi, BKPM berusaha menarik investor dengan menunjukkan keunggulan dan peluang yang ada di Indonesia. Dalam konteks investasi berkelanjutan, BKPM juga berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, BKPM berperan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, keberadaan BKPM sebagai lembaga koordinasi penanaman modal sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui peningkatan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan (Baidarus, Anggraeni, and Mauliza 2018).

BKPM berperan penting dalam memfasilitasi dan mempromosikan investasi berkelanjutan di Indonesia melalui pengembangan kebijakan yang mendukung. Salah satu inisiatif utama adalah penerbitan Panduan Investasi Lestari, yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dan investor agar menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan investasi mereka.

Panduan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari konsep investasi berkelanjutan hingga indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari investasi. Dengan adanya panduan ini, BKPM berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman investor mengenai pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan investasi yang diambil (Mutiara et al. 2018).

Selanjutnya, BKPM juga aktif dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat jaringan investasi berkelanjutan. Melalui ASEAN Investment Forum, BKPM mengajak negara-negara ASEAN untuk bersama-sama merumuskan strategi investasi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Forum ini tidak hanya menjadi ajang promosi bagi Indonesia, tetapi juga sebagai *platform* untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menarik investasi yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan komitmen BKPM untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara (Kementerian Investasi 2022).

Dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi hijau, BKPM juga menerapkan pendekatan berbasis data untuk memantau dampak dari setiap proyek investasi. Dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas, BKPM dapat menilai sejauh mana investasi tersebut memenuhi kriteria keberlanjutan. Ini termasuk analisis terhadap emisi karbon, penggunaan sumber daya alam, serta dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Dengan sistem evaluasi yang transparan, BKPM tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memberikan kepercayaan lebih kepada investor mengenai komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan.

Akhirnya, pentingnya regulasi dan kebijakan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak bisa diabaikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi salah satu landasan hukum yang memberikan perlindungan bagi investor serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui regulasi ini, BKPM berupaya mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam proses investasi dan menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor domestik maupun asing. Dengan demikian, peran BKPM sebagai penghubung antara pemerintah dan dunia usaha sangat krusial dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam meningkatkan investasi berkelanjutan di Indonesia sangat vital. Dengan berbagai kebijakan dan inisiatif yang diterapkan, BKPM tidak hanya berupaya untuk menarik investasi yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, termasuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, BKPM berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang tidak hanya kondusif, tetapi juga bertanggung jawab.

Apa Saja Hambatan dan Upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Untuk Mengatasi Hambatan yang Muncul dalam Pertumbuhan Investasi Berkelanjutan

Hambatan dalam pertumbuhan investasi berkelanjutan di Indonesia sering kali berkaitan dengan regulasi yang rumit dan ketidakpastian hukum. Misalnya,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sering kali diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak, sehingga menyebabkan kebingungan di kalangan investor. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan kompleks juga menjadi kendala utama, di mana meskipun terdapat upaya untuk menyederhanakan prosedur melalui sistem perizinan terintegrasi, implementasinya masih belum optimal. Hal ini mengakibatkan banyak investor yang merasa frustrasi dan memilih untuk menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi mereka (Purba T. M., 2024).

Dalam konteks ini, keberadaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi sangat penting. BKPM berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan investor, serta berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui reformasi regulasi dan peningkatan transparansi. Salah satu langkah yang diambil adalah penyederhanaan proses perizinan dan penerapan sistem pelayanan satu pintu (*one-stop service*) untuk mempermudah investor dalam mendapatkan izin yang diperlukan. Selain itu, BKPM juga aktif dalam melakukan dialog dengan pemangku kepentingan untuk mendengarkan masukan dan keluhan dari investor mengenai regulasi yang ada. Dengan demikian, BKPM berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia (Musmulyadi et al. 2023).

Upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam pertumbuhan investasi berkelanjutan di Indonesia sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi adalah kompleksitas regulasi yang mengatur investasi. Banyak investor merasa kebingungan dengan tumpang tindihnya peraturan antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat menghambat proses perizinan. BKPM berusaha untuk menyinkronkan regulasi ini melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai lembaga pemerintah, sehingga dapat mempermudah investor dalam mendapatkan izin yang diperlukan untuk berinvestasi (Mutiarra et al. 2018).

Selain itu, BKPM juga menghadapi tantangan terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Kualitas tenaga kerja yang masih rendah menjadi salah satu faktor penghambat bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Untuk mengatasi masalah ini, BKPM bekerja sama dengan kementerian terkait untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Program-program pelatihan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Masalah infrastruktur juga menjadi kendala signifikan dalam menarik investasi berkelanjutan. Infrastruktur yang kurang memadai dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya tarik investasi. BKPM, bersama dengan pemerintah pusat, telah berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur dasar, seperti transportasi, listrik, dan akses internet. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan investasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2024).

Kendala lain yang dihadapi adalah ketidakpastian hukum dan kebijakan yang sering berubah. Investor membutuhkan kepastian hukum untuk merasa aman dalam berinvestasi. BKPM telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan penerapan sistem pelayanan satu pintu (*one-stop service*). Dengan pendekatan ini, BKPM berharap dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan memberikan kejelasan kepada investor mengenai regulasi yang berlaku (Mutiarra et al. 2018). BKPM juga menyadari pentingnya menangani sengketa atau konflik yang mungkin timbul antara investor dan pemerintah. Untuk itu, BKPM berupaya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel dan efisien. Melalui kerjasama dengan lembaga hukum dan arbitrase, BKPM ingin memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil tanpa mengganggu kelangsungan investasi (Nurfadillah and Setiawati 2025).

Upaya yang dilakukan BKPM dalam mengatasi hambatan terhadap investasi berkelanjutan di Indonesia menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dan strategis. Tidak hanya berfokus pada penyederhanaan regulasi dan birokrasi, BKPM juga memperhatikan aspek-aspek fundamental lainnya seperti peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta kepastian hukum dan penyelesaian sengketa. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa tantangan dalam investasi berkelanjutan bersifat multidimensional dan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Meskipun berbagai inisiatif telah diluncurkan, efektivitas dari upaya-upaya tersebut masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi BKPM untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan dinamika global dan masukan dari para pelaku usaha agar iklim investasi di Indonesia semakin kondusif dan berorientasi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks global, BKPM terus memantau tren investasi internasional dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Melalui partisipasi dalam forum-forum internasional seperti ASEAN Investment Forum, BKPM berusaha untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik dengan fokus pada keberlanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra Indonesia di mata investor asing, tetapi juga memperkuat kerjasama regional dalam menarik investasi (Supanca & Rachmadi, 2006). BKPM juga aktif dalam melakukan promosi potensi investasi di sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan, teknologi informasi, dan pertanian berkelanjutan. Dengan menyoroti peluang-peluang ini, BKPM berharap dapat menarik minat investor yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan investasi berkelanjutan di Indonesia dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyederhanakan regulasi, serta memfasilitasi

perizinan melalui sistem OSS. Selain mendorong nilai investasi, BKPM juga menekankan pentingnya kualitas investasi yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Tantangan seperti tumpang tindih regulasi, birokrasi kompleks, rendahnya kualitas SDM, dan infrastruktur yang belum merata menjadi hambatan utama yang dihadapi. Untuk itu, BKPM terus melakukan reformasi, kolaborasi lintas sektor, dan promosi investasi hijau sebagai bagian dari komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu strategi penting lainnya adalah peningkatan komunikasi dan dialog antara pemerintah dan sektor swasta. BKPM secara rutin mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk mendengarkan masukan mereka mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses investasi. Dengan cara ini, BKPM dapat lebih responsif terhadap kebutuhan investor dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan dinamika pasar. Secara keseluruhan, upaya BKPM dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pertumbuhan investasi berkelanjutan menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Dengan fokus pada penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta penyelesaian sengketa secara efektif, BKPM bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa pertumbuhan investasi berkelanjutan tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan lingkungan di Indonesia. Keberhasilan BKPM dalam mengatasi hambatan-hambatan ini akan sangat menentukan masa depan perekonomian Indonesia di era global saat ini.

SIMPULAN

Kesimpulan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki peran strategis dalam mendorong investasi berkelanjutan di Indonesia melalui koordinasi lintas sektor, penyederhanaan perizinan, promosi investasi hijau, dan penerapan sistem pelayanan satu pintu (OSS). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BKPM berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Upaya ini diwujudkan melalui panduan investasi lestari, kerja sama internasional, promosi sektor strategis seperti energi terbarukan, serta pemantauan berbasis data. Di tengah tantangan regulasi kompleks, rendahnya kualitas SDM, dan infrastruktur yang belum merata, keberhasilan BKPM dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut menjadi kunci dalam menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang berdaya saing dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Baidarus, Muhammad, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, and Hazada Zafira Mauliza. 2018. "Optimalisasi Peran BKPM Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Infrastruktur Strategis Guna Mendorong Pemerataan

- Pembangunan." *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 11(1): 75–86. doi:10.48108/jurnalbppk.v11i1.163.
- Christhina, Ade. 2015. "Fungsi Dan Peranan Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Provinsi Riau." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 2(2): 1–15.
- Kementerian Investasi. 2022. "PANDUAN INVESTASI LESTARI Edisi 1.0 2022 Oleh."
- Musmulyadi, M, S Agustina, K S D br Haloho, and ... 2023. "Tantangan Regulasi Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Pendidikan ...* 7: 32380–84. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12296%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/12296/9473>.
- Mutiara, Yunial Laily, M Zainul Arifin, Irsan, and Muhammad Syahri Ramadhan. 2018. "Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia." *Nurani* 18(2): 215–26.
- Nurfadillah, Maulia, and Diana Setiawati. 2025. "Peluang Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Untuk Melindungi Investor Asing Di Indonesia." 2(2): 68–75.
- Roem, Anwar M. 2013. "Peran Dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Untuk Menarik Investasi Asing Di Provinsi Papua." *Universitas YAPIS Papua*: 14–28. <https://media.neliti.com/media/publications/141961-ID-peran-dan-fungsi-badan-koordinasi-penana.pdf>.
- Zaidun, Muhammad. 2018. "Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan Dan Harapan." : 38. [http://repository.unair.ac.id/30814/1/PG.160-10 Zai p.pdf](http://repository.unair.ac.id/30814/1/PG.160-10%20Zai%20p.pdf).
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metode Penelitian Hukum*.
- Harjono, D. K. (2007). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, A. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Investasi, K. (2022). *Panduan Investasi Lestari* \i. Jakarta.
- Purba, T. M. (2024). Tantangan dalam Regulasi Hukum Investasi di Indonesia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.
- Rafli, Gucci, & Yanto. (2020). Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bkpm) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia). *Jurnal Lex Specialis*, 1.
- Rusdi, Edwin, & Pramono. (2009). Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pengelolaan investasi di Indonesia.
- Sembiring, S. (2010). *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Supanca, & Rachmadi, I. B. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Untung. (2010). *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata. (2006). *Kajian Hukum Penanaman Modal*. Surabaya: PT Jaya Prima.